



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV
Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id
email : dinasdpkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi 40513
Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi pertanggung jawaban dengan perhitungan prestasi selama satu tahun pada Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 menguraikan Rencana Strategis Tahun 2017–2022, Penetapan Kinerja Tahun 2020, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 5.965.077.417,00** terealisasi pendapatan sampai akhir tahun sebesar **Rp. 4.592.335.646,00** atau realisasi keuangan sebesar **76,98%**. Realisasi pendapatan di Tahun 2020 tidak dapat mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RUSUNAWA), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (UPT Air Minum), Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair (UPT Air Limbah Domestik).

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 8.549.919.990,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 8.473.193.747,00** atau realisasi keuangan sebesar **99,10%**.

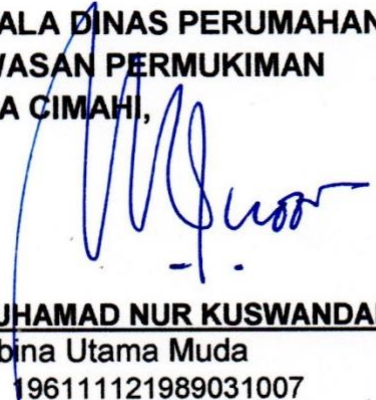
Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana awal sebesar **Rp. 102.020.346.250,00** mengalami *recofusing* dan realokasi anggaran untuk menangani dampak wabah pandemi covid-19, sehingga anggaran belanja langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar **Rp. 66.741.849.270,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 56.941.445.817,00** atau realisasi keuangan sebesar **85,31%**.

Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI,**



Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M. Eng.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196111121989031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum dan Isu Strategis.....	1
1.1.1 Gambaran Umum	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Susunan Organisasi	2
1.1.4 Dasar Hukum	5
1.2 Isu Strategis	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	9
2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	9
2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	10
2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	11
2.1.4 Program dan Kegiatan.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
2.2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja.....	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	19
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 & 2020	21
3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 Dengan Target RPJMD 2017-2022	21
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	22
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.3 Realisasi Anggaran	31

3.3.1	Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
3.3.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	32
3.3.3	Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja	35
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Penutup.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Permukiman Tahun 2017-2022	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020	15
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020	16
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	19
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	20
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	21
Tabel 3.4	Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 dengan Target RPJMD Tahun 2020	25
Tabel 3.5	Analisi Pencapaian Sasaran ke-1 Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	23
Tabel 3.6	Analissi Efisiensi Penguunaan Sumber Daya Tahun 2020	30
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Pendapatan	31
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Yang Dikelola	32
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	33
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	34
Tabel 3.11	Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan	36

DAFTAR LAMPIRAN

- L.1 Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- L.2 Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- L.3 Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020
- L.4 Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi 2020
- L.5 Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cimahi 2020
- L.6 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cimahi
2020
- L.7 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Kota Cimahi 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dan Isu Strategis

1.1.1. Gambaran Umum

Dengan telah berubahnya status Kota Cimahi dari kota administratif menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka beban kerja dan permasalahan Kota Cimahi harus ditangani oleh organisasi setingkat Kota. Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012–2017 telah terjadi perubahan masif terhadap Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

Kedudukan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) dirubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2018 kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kota

Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan teknis untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

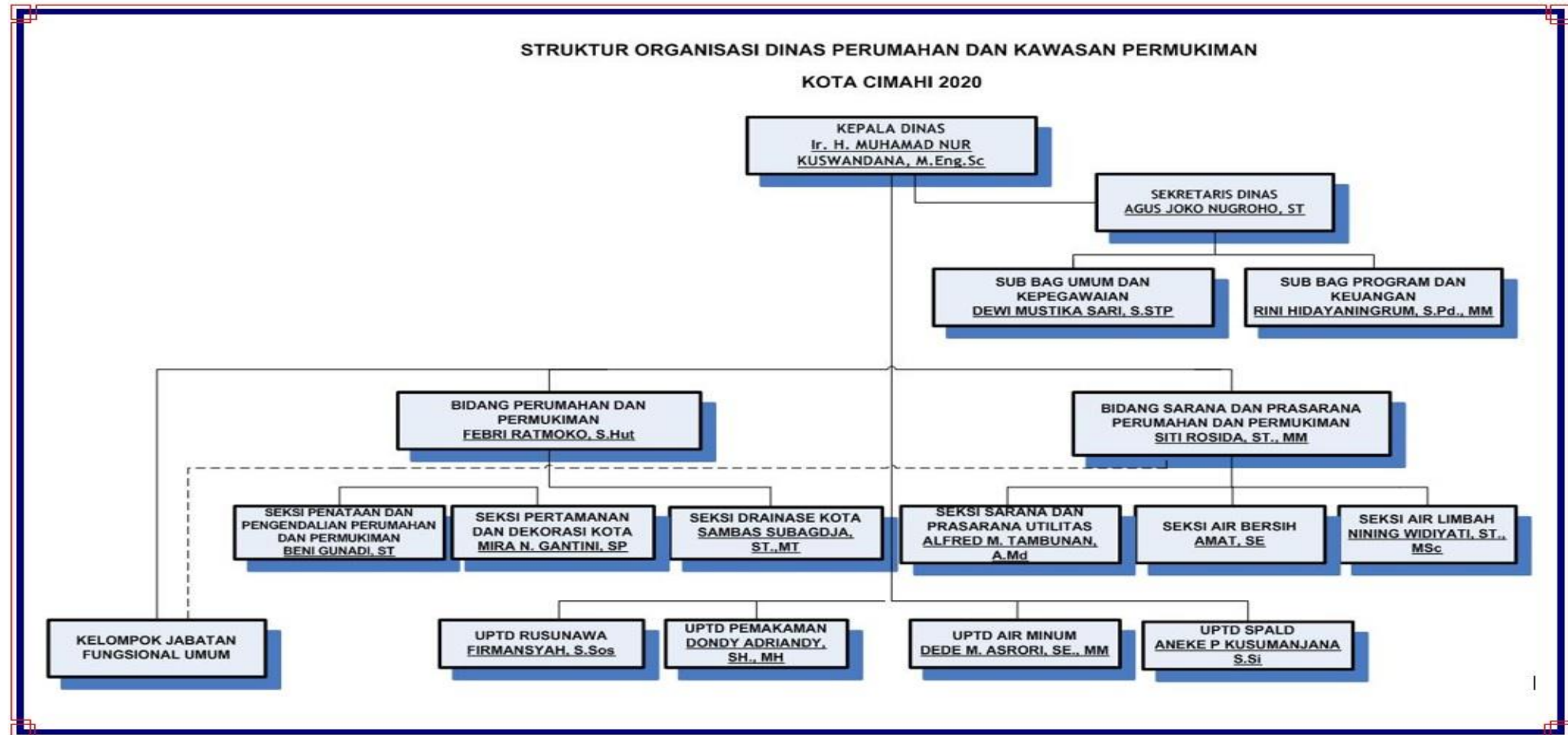
1.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

- b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota
 - c. Seksi Drainase Kota
- 4. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas
 - b. Seksi Air Bersih
 - c. Seksi Air Limbah
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelola Air Limbah Domestik;
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Air Bersih/ Air Minum;
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan RUSUNAWA;
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Pemakaman.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi



1.1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi mengacu kepada dasar hukum yaitu :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah :
 - a. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
 - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 264) Tanggal 30 Desember 2019.
 - g. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 514) Tanggal 30 Desember 2019.

1.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah / masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah masalah mengenai **Penanganan Banjir dan Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan Prioritas Pembangunan dalam rangka Penuntasan Banjir Melong dan Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Perumahan yang berwawasan lingkungan, berkualitas dan berbudaya, melalui program dan kegiatan diantaranya meliputi :

1. Drainase Kota

Drainase kota yang belum memadai dan masih diperlukan penanganan serius karena di beberapa titik lokasi sering terjadi banjir akibat sistem drainase yang belum optimal. Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi melanda wilayah Kota Cimahi adalah banjir. Terjadinya banjir dan genangan air di beberapa wilayah permukiman di Kota Cimahi terutama pada musim hujan membawa dampak sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini terjadi akibat tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya karena berbagai faktor diantaranya bencana alam, penyempitan saluran karena digunakan lahan permukiman dan fasilitas lainnya ataupun karena sedimentasi dan pendangkalan akibat sampah, lumpur maupun kotoran manusia. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi telah berusaha maksimal untuk menangani drainase yang ada di Kota Cimahi dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun instansi lain, terutama penanganan drainase di perbatasan wilayah Kota Cimahi telah bekerjasama dengan PSDA.

2. Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masing-masing akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara seimbang. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk direalisasikan, akibat dari kemiskinan yang real maupun

kemiskinan akses yang ada di lingkungan komunitas masyarakat kita yang sulit untuk dilaksanakan secara cepat sesuai kebutuhan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemiskinan yang terjadi, kebutuhan rumah yang sangat mendesak tersebut akhirnya masyarakat susah untuk merealisasikan membuat rumah, sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah semakin terbatas inilah yang menyebabkan kawasan perumahan yang kumuh dan rumah tidak layak huni semakin bertambah jumlahnya di Kota Cimahi.

Berdasarkan data pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada tahun 2020 adalah sebanyak 968 rumah. Total rumah di Kota Cimahi berdasarkan informasi dari kelurahan-kelurahan adalah sebanyak 157.523 rumah dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 152.997. Dengan begitu pada tahun 2020 menyisakan 4.526 Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

3. RUSUNAWA

Laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berdampak kepada timpangnya penyediaan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak untuk dihuni, diakibatkan oleh semakin mahalnya harga tanah akibat keterbatasan lahan. Namun demikian pemerintah daerah telah berupaya untuk memberikan layanan publik semaksimal mungkin dengan cara mengadakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dengan prinsip pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan serta keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka pemerintah daerah Kota Cimahi dan pusat telah bekerjasama dan telah berupaya untuk membangun rumah secara vertikal di beberapa lokasi, yaitu di Kelurahan Cigugur Tengah 3 Twin Block, di Kelurahan Cibeureum 4 Twin Block dan di Kelurahan Leuwigajah 3 Twin Block.

4. Pemeliharaan Kualitas Jalan Setapak

Meningkatkan kualitas pelayanan jalan setapak melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan setapak melalui program jalan setapak dengan proses pengerjaannya menggunakan paving block yang diharapkan dapat mengantisipasi banjir dan

menjadikan kawasan permukiman yang lebih tertata dan tidak kumuh juga sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan sosial ekonomi Kota Cimahi.

5. Pelayanan Air Bersih/Minum

SPM bidang Air Minum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2020 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal. Permasalahan yang dihadapi di kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Air Minum adalah **Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk** Kota Cimahi yang cukup tinggi.

6. Pelayanan Air Limbah Domestik

Sarana air limbah domestik merupakan bagian dari sanitasi yang terkait dengan urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Penanganan limbah domestik yang baik akan mencegah pertumbuhan vector-vektor penyakit dan akan meningkatkan derajat kesehatan, lebih dari itu pencemaran air tanah dan air permukaan yang digunakan sebagai sumber air bersih ataupun air baku air bersih akan terjaga jika penanganan air limbah domestik dilakukan secara tepat.

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah pelaksanaanya belum dapat mencapai target dengan rincian realisasi antara lain terbangunnya sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat sebanyak 4 unit melalui Program Sanimas Citarum Harum, optimalisasi 1 Unit SPALD-T, pembangunan 9 unit MCK baru dan renovasi 5 MCK, serta pembebasan 2 bidang tanah bakal calon lokasi IPLT. Namun masih ada 2 pekerjaan penambahan SR yang bersumber dari pendanaan Sisa DAK yang masih belum dapat dilaksanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2017–2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan terhadap perkembangan Kota Cimahi, sehingga dampak positif dan manfaat pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategis Tahun 2017–2022 merupakan acuan strategis program dan panduan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2017–2022 Rencana Strategis Tahun 2017–2022 membahas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan visinya berkaitan erat dengan visi kota Cimahi yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru Maju Agamis dan Berbudaya”** yang dijabarkan sebagai berikut :

- Maju** : Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.
- Agamis** : Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- Berbudaya** : Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi Kota Cimahi, maka ditetapkan **Visi** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) sebagai berikut : **“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, Berkualitas dan Berbudaya”**. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) dijabarkan sebagai berikut:

“Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dalam visi diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu, melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkualitas adalah upaya perwujudan sarana dan prasarana kota yang dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan dijalankan harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.”

2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan misinya berkaitan erat dengan misi kota Cimahi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk menunjang misi Kota Cimahi Misi Kota Cimahi Kelima tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik;
2. Mewujudkan Penataan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Taman dan Dekorasi Kota yang berkarakter;
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas.

2.1.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Permukiman;
2. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan diatas sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2022

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
	Tujuan	Sasaran	Indiktor Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase layanan air limbah domestik
		Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman	Presentase luasan genangan terhadap luas kota
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih / Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum
		Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Rasio luas kawasan kumuh
2	Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2.1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2020 yang meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Peningkatan Air Limbah Domestik;
3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
4. Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara;

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
 - b. Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA;
 - c. Kegiatan Pembangunan Taman Baru;

- d. Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat;
 - e. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman;
 - f. Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Taman;
2. Program Peningkatan Air Limbah Domestik, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik.
 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.
 4. Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih.
 5. Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
 - b. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai;
 - c. Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya.
 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air;
 - c. Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor;

- f. Kegiatan Penyediaan Gudang Kantor;
 - g. Kegiatan Penataan Arsip Daerah;
 - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan;
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Inventaris Barang;
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja PD;
 - e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
8. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
- a. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai.

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan dasar dari pengukuran Penetapan Kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2020, memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rincian Perjanjian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Cimahi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	100%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	6,7 Ha
2	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih	83 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	0,31 %

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp 102.020.346.250,00	
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp	3.680.371.500,00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Rp	115.450.000,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	183.449.000,00
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp	18.807.149.100,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	Rp	19.429.990.128,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Rp	15.662.727.224,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir	Rp	39.730.258.598,00
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp	4.410.950.700,00

2.2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Karena berbagai macam pertimbangan dan adanya pandemi covid-19, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melakukan penyesuaian perjanjian kinerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran atas kegiatan tahun berjalan. Perubahan perjanjian kinerja dan anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	61%%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Luas Kawasan Kumuh Ringan	12,04 Ha
2.	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum	79,24 %
3.	Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	90,06 %

Rekapitulasi perubahan anggran berdasarkan Program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN		Rp.	58.054.583.993,00
1.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp.	3.154.138.152,00
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Rp.	101.500.000,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	137.885.500,00
4.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	11.577.597.190,49
5.	Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	Rp.	4.430.945.150,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Rp.	3.359.358.089,00

7.	Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir	Rp.	32.041.851.409,00
8.	Program Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rp.	3.251.308.503,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Keberhasilan dan kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan rencana strategis tahun 2017 – 2022.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

$$\% \text{ Pencapaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	3	4	5	6	
1	Presentase Rumah Layak Huni	61%	100%	164%	Sangat Baik
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	12,04 Ha	12,04 Ha	100%	Sangat Baik
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	79,24%	69,82%	88,11%	Baik
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	90,06%	75,83%	84,19%	Baik

Dari table tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada :
 - Indikator presentase rumah layak huni 164%;
 - Indikator luas kawasan kumuh sedang dan ringan 100%.
- Capaian kinerja kurang/tidak mencapai target ditunjukkan pada :
 - Indikator presentase cakupan layanan air bersih/ minum sebesar 88,11%. Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk Kota Cimahi tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan air bersih dikarenakan keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi.
 - Indikator presentase cakupan layanan air limbah domestik 84,19%. Tidak tercapainya target disebabkan karena sulitnya lahan untuk pembangunan IPAL khususnya dipermukiman padat penduduk dan kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas terlebih pada saat adanya pandemi covid-19.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	61%	100%	164%
		Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	12,04 Ha	12,04 Ha	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih / Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	79,24%	69,82%	88,11%
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	90,06%	75,83%	84,19%

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2019 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	42%	99,53%	61 %	100,00 %
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Ha	6,71 Ha	12,04 Ha	12,04 Ha	12,04 Ha
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	72,02%	70,35%	79,24%	69,82%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	83,41%	75,98%	90,06%	75,83%

Berdasarkan tabel target dan realisasi indikator tersebut diatas diketahui bahwa realisasi tahun 2020 untuk indikator kinerja presentase rumah layak huni dan luas kawasan kumuh sedang dan ringan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan untuk indikator kinerja presentase cakupan layanan air bersih/minum dan presentase cakupan air limbah domestik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cimahi dan adanya *recofusing* anggaran akibat pandemi covid-19.

3.1.3 Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 Dengan Target RPJMD Tahun 2020

Tabel 3.4
Perbandingan Indikator Kinerja Terhadap Realisasi Tahun 2019-2020 dengan Target RPJMD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2020	Capaian Terhadap RPJMD 2020 (8=6/7*100%)
1	2	3	5	6	7	8
1	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	99,53%	100,00%	61%	164%
	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	Persen	12,04 Ha	12,04Ha	12,04 Ha	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2020	Capaian Terhadap RPJMD 2020 (8=6/7*100%)
1	2	3	5	6	7	8
2	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	Persen	70,35%	69,82%	79,24%	88,11%
3	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	Persen	75,98%	75,83%	90,06%	84,19%
RATA – RATA CAPAIAN TARGET RPJMD						109%

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2020 adalah 109%, yang artinya tingkat capaian kinerja melebihi/ melampaui target karena tingkat capaian lebih dari 100%.

3.1.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dari 3 sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel di bawah berikut:

❖ **Sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni.**

Pencapaian sasaran ke-1 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran ke-1
Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Yang Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5
1	Presentase Rumah Layak Huni	61%	100%	164%
2	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	12,04 Ha	12,04 Ha	100%

Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

- ❖ Capaian kinerja indikator kinerja 1 : “Presentase Rumah Layak Huni” adalah sebesar 100% dari target dari target sebesar 61% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga presentase capaian kinerja nya adalah 164%, capaian ini melebihi yang diperjanjikan dan dinilai sangat baik. Adapun rumus yang dipakai dalam menghitung presentase Rumah Layak Huni yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Di Wilayah Kota Cimahi}} \times 100 \%$$

- ❖ Data total rumah di Kota Cimahi tahun 2020 adalah 175.680 rumah dan total rumah layak huni sebesar 157.523 rumah, sehingga menyisakan 18.157 rumah tidak layak huni.

Permasalahan :

1. Banyak rumah tidak layak huni bukan di tanah milik sendiri;
2. kondisi eksisting penerima manfaat di kota Cimahi adalah masyarakat kurang mampu padahal sasaran penerima manfaat menurut pusat adalah ke masyarakat berpenghasilan rendah (ke MBR);

3. banyak rumah tidak layak huni yang surat/bukti kepemilikannya tidak ada, padahal rumahnya layak untuk diperbaiki;
4. yang dilihat sementara hanya data yang bukti kepemilikannya lengkap;
5. hampir semua CPCL yang akan dibantu hanya mengandalkan biaya dari pemerintah saja, swadaya hampir tidak ada

Selanjutnya masih pada sasaran Pada sasaran ke-1 : Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu :

- ❖ Capaian kinerja indikator kinerja 2 : “Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan” adalah sebesar 12,04 Ha dari target sebesar 12,04 Ha yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sehingga presentase capaian kinerja nya sebesar 100%, capaian ini menyentuh angka 100% dan dinilai sangat baik. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung luas kawasan kumuh sedang dan ringan adalah :

Luas Kawasan Kumuh

----- X 100 %

Luas Wilayah Kota Cimahi

- ❖ realisasi capaian luas kawasan kumuh sedang dan ringan pada tahun 2020 adalah 12,04 Ha, berdasarkan surat keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Walikota Cimahi pada tahun 2015, luas kumuh Kota Cimahi sebesar 176,77 Ha, sedangkan yang masuk prioritas flag 1 seluas 162,56 Ha. Capaian pengurangan kumuh yang dihasilkan dari kegiatan KOTAKU dan kolaborasi pada tahun 2020 di Kota Cimahi berdasarkan hasil rapat perhitungan capaian pengurangan kumuh adalah sekitar 12,04 Ha.

Permasalahan :

1. Belum adanya database yang lengkap kegiatan - kegiatan penanganan kumuh terutama dari kegiatan kolaborasi, sehingga kesulitan untuk untuk memasukan data kolaborasi

dalam perhitungan capaian pengurangan kumuh di Kota Cimahi.

2. Masyarakat menginginkan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan yang dilaksanakan merata di semua wilayah tidak hanya di wilayah kumuh RT Flag, sehingga kegiatan kolaborasi banyak yang tidak berdampak terhadap perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh.
3. Kegiatan kolaborasi masih belum terencana secara maksimal.
4. Beberapa permasalahan yang bobotnya besar dipermasalahkan kondisi bangunan dan sanitasi, dimana kegiatan RTLH belum bisa diintervensi oleh BPM dan bantuan RTLH dari kegiatan kolaborasi belum berdampak terhadap capaian perhitungankumuh, serta untuk sanitasi kesulitan masalah ketesediaan lahan.

Solusi :

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Cimahi;
2. Memberikan penjelasan secara terus menerus kepada masyarakat tentang target penanganan kumuh dan dilakukan diskusi bersama-sama untuk penyelesaiannya;
3. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kegiatan kolaborasi terutama dalam perencanaan penanganan wilayah kumuh;
4. Membuat dan menyepakati satu data satu perencanaan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan permukiman terutama dalam penanganan kawasan kumuh;
5. Mengaktifkan peran Pokja PKP dimulai dengan pertemuan rutin, dan segera melaksanakan rapat khusus persiapan review SK kumuh dan review dokumen RP2KPKP.
6. Mengawal FGD Musrenbang kelurahan untuk di sekaligus membahas atau mereview dokumen baseline kumuh sebagai bahan untuk mereview SK kumuh dan review RP2KPKP.

❖ Sasaran ke-2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih / Air Minum

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5
1	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/ Minum	79,24%	69,82%	88,11%

Pada sasaran ke 2 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih/Air Minum dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum” tahun 2020 adalah sebesar 69,82%, angka ini turun 1,01% dari 70,35% pada tahu 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Cimahi tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan air bersih dikarenakan keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi. Adapun formulasi perhitungan capaian layanan air bersih/minum adalah sebagai berikut :

Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Minum

----- X 100 %

Jumlah Penduduk

Permasalahan :

- 1. Keterbatsan sumber air baku;
- 2. Penurunan muka air tanah;
- 3. Keterbatasan/sulit mendapatkan lahan;
- 4. Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar;
- 5. Lambannya program penyediaan SPAM regional;
- 6. Pengelolaan SPAM oleh kelompok pengguna dan pemanfaat air (KP2A) sebagai belum berjalan optimal dan baik.

Solusi :

- 1. Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
- 2. Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
- 3. Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
- 4. Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;

- 5. Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional;
- 6. Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

❖ **Sasaran ke-3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik.**

No	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5
1	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	90,06%	75,83%	84,19%

Pada sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik” tahun 2020 adalah sebesar 75,83%, angka ini turun sebesar 0,15% dari tahun 2019 disertai capaian kinerja yang menurun menjadi 84.2% dari tahun sebelumnya yaitu 91,09%. Sedangkan berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2017-2020 target capaian tiap tahunnya naik sebesar 7,68%. Sulitnya lahan untuk pembangunan IPAL khususnya di permukiman padat penduduk, kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk covid, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Disamping itu pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi. Adapun formulasi perhitungannya sebagai berikut :

Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah

X 100 %

Jumlah Penduduk

Permasalahan :

- 1. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang

memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;

2. Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
3. Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;
4. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
6. Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk permasalahan COVID-19. Disamping itu terjadi pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar

Solusi :

- 1. Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan & skala kota;
- 2. Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka;
- 3. Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
- 4. Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi;
- 5. Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2021;
- 6. Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;
- 7. Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Presentase Efisiensi Biaya =

Realisasi Biaya

Target Biaya

X 100 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya biaya setiap program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (7=3/5*100)
			Rp	%	
1	2	3	5	6	7
1	Program Pengembangan Perumahan	15.923.699.090,00	15.721.093.170,00	98,72	101,28%
2	Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	6.240.415.488,00	4.969.184.850,00	79,62	125,58%
3	Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.335.836.950,00	2.918.442.700,00	87,48	144,30%
4	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	6.068.145.805,00	2.917.294.760,00	48,07	208%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir	31.736.992.962,00	27.575.470.337,00	86,88	115,09%
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.196.113.475,00	2.603.517.150,00	81,45	122,76%
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	139.145.500,00	134.942.850,00	96,97	103,11%
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	101.500.000,00	101.500.000,00	100	100%
TOTAL ANGGARAN		66.741.849.270,00	56.941.445.817,00	85,31	117,21%

Pada tahun 2020 realisasi anggaran untuk semua program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Rp. 56.941.445.817,00, sementara target anggaran untuk semua program yaitu Rp. 66.741.849.270,00. Dengan perhitungan efisiensi diatas, diperoleh presentase 117,21%.

Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses

penyederhanaan desain dan penggunaan material yang minimalis, sehingga pencapaian target diharapkan dapat dicapai secara efisien.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019 belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Uraian pembiayaan langsung langsung dan tidak langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	74.800.000,00	119.085.000,00	159,20
2.	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.588.743.826,00	1.852.904.686,00	71,57
3.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.100.000,00	97.035.000,00	193,68
4.	Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair	40.000.000,00	30.180.000,00	75,45
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha	2.401.433.591,00	2.452.106.800,00	102,11

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
	Daerah			
6.	Pendapatan BLUD	810.000.000,00	940.277.700,00	116,08
	TOTAL	5.965.077.417,00	5.491.589.186,00	92,06

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 5.965.077.417,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp 5.491.589.186,00** atau realisasi keuangan sebesar **92,06%**, rata-rata realisasi pendapatan di Tahun 2020 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha dan pendapatan BLUD Air Minum.

3.3.2 **Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja yang Dikelola
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.549.919.990,00	8.473.193.747,00	99,10
2	Belanja Langsung	66.741.849.270,00	56.941.445.817,00	85,31
	TOTAL	75.291.769.260,00	65.414.639.564,00	86,88

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 75.291.769.260,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp 65.414.639.564,00** atau realisasi keuangan sebesar **86,88%**.

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Gaji dan Tunjangan	3.970.000.000,00	100	3.898.673.747,00	98,20
2	Tambahan Penghasilan	4.219.919.990,00	100	4.214.520.000,00	99,87
3	Tunjangan Transportasi ASN	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100
	Belanja Tidak Langsung	8.549.919.990,00	100	8.473.193.747,00	99,10

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 8.549.919.990,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **99,10%** yakni sebesar **Rp 8.473.193.747,00**.

2) Belanja Langsung

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2020

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Program Pengembangan Perumahan	15.923.699.090,00	98,69	15.721.093.170,00	98,72
2	Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	6.240.415.488,00	91,39	4.969.184.850,00	79,62
3	Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.335.836.950,00	100	2.918.442.700,00	87,48
4	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	6.068.145.805,00	52,24	2.917.294.760,00	48,07
5	Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir	31.736.992.962,00	99,97	27.575.470.337,00	86,88
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.196.113.475,00	96,68	2.603.517.150,00	81,45
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	139.145.500,00	99,98	134.942.850,00	96,97
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	101.500.000,00	100	101.500.000,00	100
BELANJA LANGSUNG		66.741.849.270,00	94,33	56.941.445.817,00	85,31

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar

Rp 66.741.849.270,00 penyerapan secara presentase keuangan adalah **85.31%** yakni sebesar **Rp 56.941.445.817,00**.

3.3.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat ditentukan melalui evaluasi pencapaian output dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Tabel 3.11
Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggggaran
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan												
1	Meningkatnya Perumahan Dan Kawsan Permukiman Yang Layak Huni	1.Presentase Rumah Layak Huni 2. Luas Kawasan Kumuh Sedang Dan Ringan		Program Pengembangan Perumahan	15.923.699.090,00	100,00	15.923.699.090,00	100.00	98,68	15.721.093.170,00	96,62	96,62
			1	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	7.912.192.388,00	100,00	7.912.192.388,00	100,00	100,00	7.891.235.084,00	99,74	99,74
			2	Pengelolaan RUSUNAWA	2.950.743.750,00	100,00	2.950.743.750,00	100,00	100,00	2.942.690.850,00	99,73	99,73
			3	Pembangunan Taman Baru	291.779.880,00	100,00	291.779.880,00	100,00	100,00	289.114.150,00	99,09	99,09
			4	Pemeliharaan Taman	2.548.024.572,00	100,00	2.548.024.572,00	100,00	100,00	2.513.262.686,00	98,64	98,64

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			5	Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	1.663.878.000,00	100,00	1.663.878.000,00	100,00	98,27	1.544.895.400,00	92,85	92,85
			6	Pengelolaan Pemakaman	44.461.000,00	100,00	444.461.000,00	100,00	92,53	442.121.000,00	99,47	99,47
			7	Penetapan Kebijakan Strategi Dan Program Perumahan	112.619.500,00	100,00	112.619.500,00	100,00	100,00	97.774.000,00	86,82	86,82
				Program Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	3.335.836.950,00	100,00	3.335.836.950,00	100,00	100,00	2.918.442.700,00	87,49	87,49
			1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.335.836.950,00	100,00	3.335.836.950,00	100,00	100,00	2.918.442.700,00	87,49	87,49
				Program Peningkatan Kapasitas Sungai Dan Pengendali Banjir	31.736.992.962,00	100,00	31.736.992.962,00	100,00	99,18	27.575.470.337,00	92,97	92,97
			1	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1.154.900.000,00	100,00	1.154.900.000,00	100,00	100,00	1.144.925.000,00	99,14	99,14
			2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	20.754.698.153,00	100,00	20.754.698.153,00	100,00	100,00	16.642.367.937,00	80,19	80,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
							Keuangan			Keuangan		
						Fisik (%)	Rp	%	Fisik (%)	Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Angggaran
			3	Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	9.827.394.809,00	100,00	9.827.394.809,00	100,00	97,56	9.788.177.400,00	99,60	99,60
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih /Air Minum	Presentase Cakupan Layanan Air Bersih		Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	6.068.145.805,00	100,00	6.068.145.805,00	100,00	52,23	3.387.890.355,00	62,03	62,03
			1	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	3.868.045.089,00	100,00	3.868.045.089,00	100,00	40,88	1.527.350.000,00	39,49	39,49
			2	Pengelolaan Pelayanan Air Bersih	2.200.100.716,00	100,00	2.200.100.716,00	100,00	63,59	1.860.540.355,00	84,57	84,57
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik		Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	6.240.415.488,00	100,00	6.240.415.488,00	100,00	91,39	4.969.184.850,00	85,39	85,39
			1	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	5.062.233.688,00	100,00	5.062.233.688,00	100,00	89,88	3.853.980.458,00	76,13	76,13
			2	Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	1.178.181.800,00	100,00	1.178.181.800,00	100,00	92,90	1.115.204.392,00	94,65	94,65

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dalam mengelola sumberdaya dan kebijaksanaan. Pengelolaan tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2019, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2019 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 5.965.077.417,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp. 5.491.589.186,00** atau realisasi keuangan sebesar **92,06 %**. Realisasi pendapatan di Tahun 2020 tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi penghasilan masyarakat. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Blud Air Minum.
2. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Langsung :
 - 1) Program Pengembangan Perumahan;

- 2) Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik;
- 3) Program Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir;
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 8) Program Peningkatan Kapasitas dan Aparatur Sipil Negara;

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 8.549.919.990,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 8.473.193.747,00** atau realisasi keuangan sebesar **99,10 %**.

Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 dari rencana yang ditargetkan sebesar sebesar **Rp. 66.741.849.270,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 56.941.445.817,00** atau realisasi keuangan sebesar **85,31%**. Hal tersebut menunjukkan kinerja DPKP Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu, Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum, Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan, Presentase Rumah Layak Huni. Pencapaian ke 4 (empat) Indikator Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

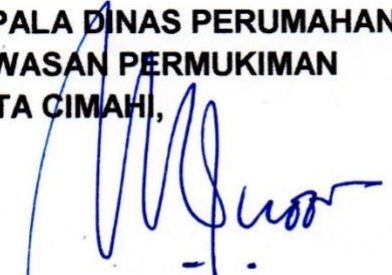
1. Presentase Cakupan Layanan Air Bersih / Air Minum sudah cukup baik dari target 79,24% terealisasi 69,82% dengan capaian kinerja 88,11%.
2. Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik sudah cukup baik dari target 90,06% terealisasi 75,83% dengan capaian kinerja 84,19%.
3. Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan sudah sangat baik dari target 12,04 Ha terealisasi 12,04 Ha dengan capaian kinerja 100%
4. Presentase Rumah Layak Huni sangat baik dari target 61% terealisasi 100%

Secara umum capaian Indikator Sasaran strategis menunjukan keberhasilan, meskipun masih terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam penyelesaian pekerjaan, serta mendorong aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja. Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja dimasa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah, serta masyarakat akan dilakukan dengan lebih intensif.

Cimahi, 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI,**



Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M. Eng.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196111121989031007